



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 27), maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 27);

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah melalui tahap Penyusunan Rancangan Perubahan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Penetapan Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2021.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 khususnya rencana pada tahun pertama.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 disusun sebagai bahan penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2021 dan menjadi acuan penyusunan Perubahan RKA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yaitu “meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten klungkung”.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 TAHUN 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
- 10) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020;
- 11) Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung;
- 12) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018- 2023;
- 13) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35).
- 14) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 adalah :

- a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung selama tahun 2021
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang mencakup, antara lain :

- 1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, proses penyusunan Perubahan Renja, Keterkaitan antara Perubahan Renja dengan Perubahan RKPD, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.
- 1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 1.3 Maksud dan Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja.
- 1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah sampai Triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Menganalisis permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang menguraikan isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah saat ini.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional menguraikan Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung s.d. Triwulan II tahun 2021 adalah sebagaimana tersaji dalam table 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2021

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2020) | | Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2021 | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2021) | Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2021) | | Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2021) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penerimaan Jawab | Ket. | |
|-------------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|----|---|----|--|-------------------|----|----|---------------------------------|----|--|--|----|---|----|--|----|----------------------------|------|---------------------------|
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (RENJA) | Indeks Reformasi dan Birokrasi Perangkat Daerah (RENJA) | | | | | 14 | 20.352.699.560,00 | | | | | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.01 | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RENJA) | Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti (RENJA) | | | | | 100 | 12.490.400,00 | | | | | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat | | | | | 8 | 8.006.400,00 | | | | | | | | | | | | | | Asisten Administrasi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|------------------|----|------------------|----|------------------|--|--|--|------|------------------|--|--|---------------------------|--|
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DPA) | Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN (DPA) | | | | | | 0 | 3 | 3.816.184.707,00 | 3 | 4.218.134.355,00 | 6 | 8.034.319.062,00 | | | | 6 | 8.034.319.062,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA) | Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan dan Semester Tepat Waktu (DPA) | | | | | | 0 | 3 | 3.236.350,00 | 3 | 7.761.691,00 | 6 | 10.998.041,00 | | | | 6 | 10.998.041,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (DPA) | Capaian Disiplin Aparatur (DPA) | | | | | | 0 | 4 | 80.893.008,00 | 0 | 121.939.512,00 | 42 | 202.832.520,00 | | | | 41,6 | 202.832.520,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.05 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (DPA) | Data kepegawaian Terupdate Tepat Waktu (DPA) | | | | | | 0 | 4 | 80.893.008,00 | 0 | 121.939.512,00 | 42 | 202.832.520,00 | | | | 41,6 | 202.832.520,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah (DPA) | Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DPA) | | | | | | 0 | 2 | 554.149.552,00 | 25 | 743.805.781,00 | 50 | 1.297.955.333,00 | | | | 50 | 1.297.955.333,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DPA) | Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia Tepat Waktu (DPA) | | | | | | 0 | 3 | 382.417.380,00 | 3 | 535.048.868,00 | 6 | 917.466.248,00 | | | | 6 | 917.466.248,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase pemenuhan Bahan Logistik (DPA) | | | | | | 0 | 3 | 750.000,00 | 3 | 0 | 6 | 750.000,00 | | | | 6 | 750.000,00 | | | Asisten Administrasi | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|--------------|---|---|----------------|----|----------------|----|----------------|--|--|--|----|----------------|--|------|---------------------------|--|
| | | | | | | Pemerintahan Daerah (DPA) | Daerah (DPA) | | | | | | | | | | | | | | Umum | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DPA) | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah Terpelihara (DPA) | | 0 | 3 | 126.657.650,00 | 1 | 149.991.955,00 | 4 | 276.649.605,00 | | | | 4 | 276.649.605,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (DPA) | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH/WKDH (DPA) | | 0 | 2 | 227.706.434,00 | 25 | 219.717.668,00 | 50 | 447.424.102,00 | | | | 50 | 447.424.102,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (DPA) | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH (DPA) | | 0 | 2 | 77.706.434,00 | 25 | 69.717.668,00 | 50 | 147.424.102,00 | | | | 50 | 147.424.102,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (DPA) | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH (DPA) | | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | | | | 50 | 0 | | | Asisten Administrasi Umum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|--|--|--|--|---|----|----------------|----------------|----------------|--|--|----|----------------|--|--|---------------------------|
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 3 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (DPA) | Persentase Pemenuhan Medical Check Up KDH/WKDH (DPA) | | | | | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | | | 50 | 0 | | | Asisten Administrasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 4 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (DPA) | Persentase Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH (DPA) | | | | | 0 | 25 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 300.000.000,00 | | | 50 | 300.000.000,00 | | | Asisten Administrasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (DPA) | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (DPA) | | | | | 0 | 25 | 139.997.000,00 | 209.991.000,00 | 349.988.000,00 | | | 50 | 349.988.000,00 | | | Asisten Administrasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.12 | 1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (DPA) | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (DPA) | | | | | 0 | 25 | 79.998.000,00 | 119.995.000,00 | 199.993.000,00 | | | 50 | 199.993.000,00 | | | Asisten Administrasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.12 | 2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (DPA) | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (DPA) | | | | | 0 | 25 | 59.999.000,00 | 89.996.000,00 | 149.995.000,00 | | | 50 | 149.995.000,00 | | | Asisten Administrasi Umum |
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | | Penataan Organisasi (DPA) | Persentase OPD Dengan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Baik (DPA) | | | | | 0 | 0 | 415.000,00 | 12.637.675,00 | 13.052.675,00 | | | 0 | 13.052.675,00 | | | Asisten Administrasi Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|--|--|--|--|---|-----|----------------|---|----------------|-----|----------------|--|--|------|----------------|--|--|---------------------------|--|
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (DPA) | Persentase Perangkat Daerah dengan Kematangan Perangkat Daerah Sangat Tinggi (DPA) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337.675,00 | 0 | 1.337.675,00 | | | 0 | 1.337.675,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (DPA) | Persentase Unit Pelayanan Dengan Standar Pelayanan Publik Memadai (DPA) | | | | | 0 | 47 | 415.000,00 | | | 47 | 415.000,00 | | | 46,8 | 415.000,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (DPA) | Jumlah Perangkat Daerah Yang Siap Mengikuti Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (DPA) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.300.000,00 | 0 | 11.300.000,00 | | | 0 | 11.300.000,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (DPA) | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah (DPA) | | | | | 0 | 100 | 207.768.213,00 | 0 | 495.575.196,00 | 100 | 703.343.409,00 | | | 100 | 703.343.409,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | 1 | Fasilitasi Keprotokolan (DPA) | Persentase Pemenuhan Layanan Protokol Pimpinan Daerah (DPA) | | | | | 0 | 100 | 34.183.459,00 | 0 | 43.299.065,00 | 100 | 77.482.524,00 | | | 100 | 77.482.524,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (DPA) | Persentase Pemenuhan Layanan Komunikasi Pimpinan Daerah (DPA) | | | | | 0 | 100 | 130.238.754,00 | 0 | 372.346.131,00 | 100 | 502.584.885,00 | | | 100 | 502.584.885,00 | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan (DPA) | Persentase Pemenuhan Layanan Dokumentasi | | | | | 0 | 100 | 43.346.000,00 | 0 | 79.930.000,00 | 100 | 123.276.000,00 | | | 100 | 123.276.000,00 | | | Asisten Administrasi | |

| | | | | | | (RENJA) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|--|--|--|-----|------------------|-----|--------------|---|--------------|-----|--------------|-----|-------|-----|--------------|---|
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan (RENJA) | Cakupan Terpenuhi Penataan Administrasi Pemerintahan (RENJA) | | | 100 | 69.455.200,00 | 100 | 701.000,00 | 0 | 1.415.000,00 | 100 | 2.116.000,00 | 100 | 3,05 | 100 | 2.116.000,00 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (RENJA) | Cakupan Terpenuhi Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (RENJA) | | | 100 | 8.853.300,00 | 100 | 1.247.900,00 | 0 | 2.000.000,00 | 100 | 3.247.900,00 | 100 | 36,69 | 100 | 3.247.900,00 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (RENJA) | Cakupan Terpenuhi Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (RENJA) | | | 100 | 8.800.500,00 | 100 | 0 | 0 | 4.316.000,00 | 100 | 4.316.000,00 | 100 | 49,04 | 100 | 4.316.000,00 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan (RENJA) | Terpenuhi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (RENJA) | | | 1 | 1.769.978.404,00 | | | | | | | | | | | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|--|--|---------|----------------|--|--|---|--|
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (DPA) | Jumlah Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan (DPA) | | | | | 0 | 1 | 285.437.44 2,00 | 0 | 673.047.08 4,00 | 1 | 958.484.52 6,00 | | | 1 | 958.484.526,00 | | | Asisten Perintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (DPA) | Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan (DPA) | | | | | 0 | 1 | 5.655.142,0 0 | 0 | 3.370.542,0 0 | 1 | 9.025.684,0 0 | | | 1 | 9.025.684,00 | | | Asisten Perintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat (DPA) | Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Bidang Pariwisata yang ditetapkan (DPA) | | | | | 0 | 1 | 3.386.500,0 0 | | | 1 | 3.386.500,0 0 | | | 1 | 3.386.500,00 | | | Asisten Perintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (DPA) | Jumlah produk hukum yang ditetapkan tepat waktu (DPA) | | | | | 0 | 2 | 114.244.89 7,00 | 12 5 | 142.468.51 6,00 | 15 0 | 256.713.41 3,00 | | | 15 0 | 256.713.413,00 | | | Asisten Perintahan dan Kesejahteraan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|--|--|--|--|---|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil (RENJA) | Jumlah Kebijakan Ekonomi Mikro yang ditetapkan (RENJA) | | | | | 1 | 16.488.000,00 | | | | | | | | | Asisten Perencanaan dan Pembangunan | |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (DPA) | Cakupan terpenuhinya kebijakan Bidang Perekonomian (DPA) | | | | | | 0 | 50 | 14.260.642,00 | 40 | 13.433.163,00 | 90 | 27.693.805,00 | | 90 | 27.693.805,00 | Asisten Perencanaan dan Pembangunan |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (DPA) | Jumlah kebijakan Bidang BUMD dan BLUD yang ditetapkan (DPA) | | | | | | 0 | 1 | 1.626.800,00 | 1 | 1.115.000,00 | 2 | 2.741.800,00 | | 2 | 2.741.800,00 | Asisten Perencanaan dan Pembangunan |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | 2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (DPA) | Jumlah kebijakan Bidang Pengendalian dan Distribusi yang ditetapkan (DPA) | | | | | | 0 | 1 | 9.502.442,00 | 1 | 12.143.163,00 | 2 | 21.645.605,00 | | 2 | 21.645.605,00 | Asisten Perencanaan dan Pembangunan |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil (DPA) | Jumlah kebijakan Bidang Ekonomi Mikro Kecil yang ditetapkan (DPA) | | | | | | 0 | 1 | 3.131.400,00 | 0 | 175.000,00 | 1 | 3.306.400,00 | | 1 | 3.306.400,00 | Asisten Perencanaan dan Pembangunan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|--|--|--|--|----|----------------|--|---|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|----|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | | Administrasi Pembangunan (RENJA) | Rekomendasi yang ditindak lanjuti (RENJA) | | | | | 80 | 205.671.664,00 | | | | | | | | | | | Asisten Perencanaan dan Pembangunan | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (RENJA) | Cakupan Program Pembangunan (RENJA) | | | | | 80 | 27.604.000,00 | | | | | | | | | | | Asisten Perencanaan dan Pembangunan | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (RENJA) | Laporan Pengendalian dan Evaluasi (RENJA) | | | | | 12 | 22.733.500,00 | | | | | | | | | | | Asisten Perencanaan dan Pembangunan | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (RENJA) | Pelaporan Evaluasi Pembangunan Daerah (RENJA) | | | | | 12 | 155.334.164,00 | | | | | | | | | | | Asisten Perencanaan dan Pembangunan | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (DPA) | Persentase Rencana Aksi Pembangunan Daerah yang Terealisasi (DPA) | | | | | | 0 | | 2 | 31.670.310,00 | 25 | 52.059.065,00 | 50 | 83.729.375,00 | | | 50 | 83.729.375,00 | | Asisten Perencanaan dan Pembangunan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|--|--|--|-----|----------------|---|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|----|---------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (DPA) | Persentase Cakupan Program Daerah (DPA) | | | | | 0 | 2 | 8.593.500,00 | 25 | 26.780.000,00 | 50 | 35.373.500,00 | | | 50 | 35.373.500,00 | | | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (DPA) | Persentase Tindak Lanjut Hasil Inspeksi (DPA) | | | | | 0 | 2 | 2.493.100,00 | 20 | 0 | 40 | 2.493.100,00 | | | 40 | 2.493.100,00 | | | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (DPA) | Jumlah laporan Pembangunan Daerah (DPA) | | | | | 0 | 2 | 20.583.710,00 | 33 | 25.279.065,00 | 58 | 45.862.775,00 | | | 58 | 45.862.775,00 | | | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | | |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil monitoring (DPA) | | | | | | 2 | | 0 | | 25 | | | | 25 | | | | | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | | Pengadaan Barang dan Jasa (RENJA) | Persentase Pengadaan B/J Yang Selesai (RENJA) | | | | 100 | 359.414.606,00 | | | | | | | | | | | | | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (RENJA) | Persentase dokumen persiapan B/J sesuai standar (RENJA) | | | | 70 | 252.188.702,00 | | | | | | | | | | | | | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | | |
| | | | | | | Persentase kontrak B/j terlaksana (RENJA) | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
| | | | | | | Persentase penetapan penyedia | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|----|-----|---------------|---------------|---------------|----|----------------|--|--|------|----------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | | (RENJA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase perencanaan B/J sesuai standar (RENJA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (RENJA) | Persentase Layanan Aplikasi Sistem Informasi B/J Beroperasi (RENJA) | 95 | | | 78.643.952,00 | | | | | | | | | | | | Asisten Perencanaan dan Pembangunan |
| | | | | | | Persentase Layanan Jaringan Sistem Informasi B/J (RENJA) | 95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan infrastruktur Sistem Informasi B/J (RENJA) | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase proses pbj melalui SI (RENJA) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (RENJA) | Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM B/J (RENJA) | 60 | | | 28.581.952,00 | | | | | | | | | | | | Asisten Perencanaan dan Pembangunan |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM dari Pengadaan Baru (RENJA) | 42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase SDM B/J Bersertifikat (RENJA) | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (DPA) | Persentase Pengadaan B/J Yang Selesai (DPA) | | 073 | 59.987.026,00 | -18 | 59.328.039,00 | 55 | 119.315.065,00 | | | 55,4 | 119.315.065,00 | | | | | Asisten Perencanaan dan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|---|-----|---------------|------|---------------|-----|---------------|--|--|------|---------------|--|--|-------------|-------------------------------------|
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (DPA) | Persentase dokumen persiapan B/J sesuai standar (DPA) | 0 | 10 | 22.687.542,00 | 0 | 49.216.413,00 | 10 | 71.903.955,00 | | | 10 | 71.903.955,00 | | | Pembangunan | Asisten Perencanaan dan Pembangunan |
| | | | | | | Persentase kontrak B/j terlaksana (DPA) | | 0 | | 7,14 | | 7,1 | | | | 7,14 | | | | | |
| | | | | | | Persentase penetapan penyedia (DPA) | | 73 | | -18 | | 55 | | | | 55,4 | | | | | |
| | | | | | | Persentase perencanaan B/J sesuai standar (DPA) | | 100 | | 0 | | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (DPA) | Persentase Layanan Aplikasi Sistem Informasi B/J Beroperasi (DPA) | 0 | 100 | 10.578.442,00 | -0,1 | 5.055.813,00 | 10 | 15.634.255,00 | | | 99,7 | 15.634.255,00 | | | | Asisten Perencanaan dan Pembangunan |
| | | | | | | Persentase pemenuhan infrastruktur Sistem Informasi B/J (DPA) | | 83 | | 0 | | 83 | | | | 83,3 | | | | | |
| | | | | | | Persentase proses PBJ melalui Sistem Informasi B/J (DPA) | | 39 | | 7,54 | | 11 | | | | 11,4 | | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (DPA) | Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM B/J (DPA) | 0 | 21 | 26.721.042,00 | 0 | 5.055.813,00 | 21 | 31.776.855,00 | | | 21,4 | 31.776.855,00 | | | | Asisten Perencanaan dan Pembangunan |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM dari Pengadaan Baru (DPA) | | 43 | | 0 | | 43 | | | | 42,9 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|--|--|--|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| 4 | 1 | 4 | | | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (RENJA) | Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpenuhi tepat waktu (RENJA) | | | | 100 | 17.953.397.730,00 | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum |
| | | | | | | Persentase kegiatan Pimpinan Daerah terlaksana (RENJA) | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Capaian Program Aksi (RENJA) | | | | 82 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 2.01 | | Pelaksanaan Administrasi Umum (RENJA) | Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpenuhi Tepat Waktu (RENJA) | | | | 100 | 14.219.259.402,00 | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum |
| 4 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian (RENJA) | Persentase Layanan Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian Dengan Baik (RENJA) | | | | 100 | 8.398.708.554,00 | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum |
| 4 | 1 | 4 | 2.01 | 2 | Pengelolaan Perlengkapan (RENJA) | Persentase Pengelolaan Perlengkapan Dalam Setahun (RENJA) | | | | 100 | 771.936.164,00 | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum |
| 4 | 1 | 4 | 2.01 | 3 | Pengelolaan Rumah Tangga (RENJA) | Jumlah Bulan Rumah Tangga Dalam Kondisi Baik (RENJA) | | | | 12 | 5.048.614.684,00 | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|--|--|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 4 | 1 | 4 | 2.02 | | Penataan Organisasi (RENJA) | Presentase Capaian Program Aksi Reformasi Birokrasi (RENJA) | | | 82 | 334.847.404,00 | | | | | | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum | | |
| 4 | 1 | 4 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (RENJA) | Persentase Perangkat Daerah dengan Kematangan Perangkat Daerah Baik (RENJA) | | | 50 | 2.175.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 4 | 2.02 | 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (RENJA) | Presentase Unit Pelayanan Dengan Standar Pelayanan Publik Memadai (RENJA) | | | 100 | 2.175.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 4 | 2.02 | 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (RENJA) | Jumlah Perangkat Daerah Dengan Hasil Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi Baik (RENJA) | | | 5 | 330.496.404,00 | | | | | | | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum | |
| | | | | | | Jumlah Sistem Reward dan Punishment (RENJA) | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 2.03 | | Protokol dan Komunikasi Pimpinan (RENJA) | Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah (RENJA) | | | 100 | 3.399.290.924,00 | | | | | | | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 4 | 2.03 | 1 | Fasilitasi Keprotokolan (RENJA) | Persentase Pemenuhan Layanan Protokol Pimpinan Daerah (RENJA) | | | 100 | 92.244.808,00 | | | | | | | | | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---|---|--|---|---|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|--|
| 4 | 1 | 4 | 2.03 | 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (RENJA) | Persentase Pemenuhan Layanan Komunikasi Pimpinan Daerah (RENJA) | | | | | 100 | 2.626.216.616,00 | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum | |
| 4 | 1 | 4 | 2.03 | 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan (RENJA) | Persentase Pemenuhan Layanan Dokumentasi Pimpinan Daerah (RENJA) | | | | | 100 | 680.829.500,00 | | | | | | | | Asisten Administrasi Umum | |
| Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | 0 | 0 | | 41.820.917.344,00 | 5.819.779.700,00 | 7.443.251.161,00 | 13.263.030.861,00 | 13.263.030.861,00 | | | | | | | |
| Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja Program Bidang Urusan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | 0 | 0 | | 41.820.917.344,00 | 5.819.779.700,00 | 7.443.251.161,00 | 13.263.030.861,00 | 13.263.030.861,00 | | | | | | | |
| Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja Dari Seluruh Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dari sebanyak 3 program dan 18 kegiatan yang terdapat pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021, terdapat 12 kegiatan dibawah (45%) yang belum mencapai target kinerja yang direncanakan. Terdapat 1 program (100%) yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan terdapat 2 Program yang belum memenuhi target kinerja adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Program-Program Yang Belum Memenuhi Target Kinerja Yang
Direncanakan

| Kode | Program | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|---|---|-------------|-----------|-------------|
| 4.1.1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Program Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten | 87 Point | 63,64 | 73,15 |
| 4.1.3 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Capaian IKU Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 100 Persen | 90,00 | 90 |
| | | Tingkat Kepuasan Pengguna atas Pemilihan Penyedia | 3,30 Indeks | 3,27 | |

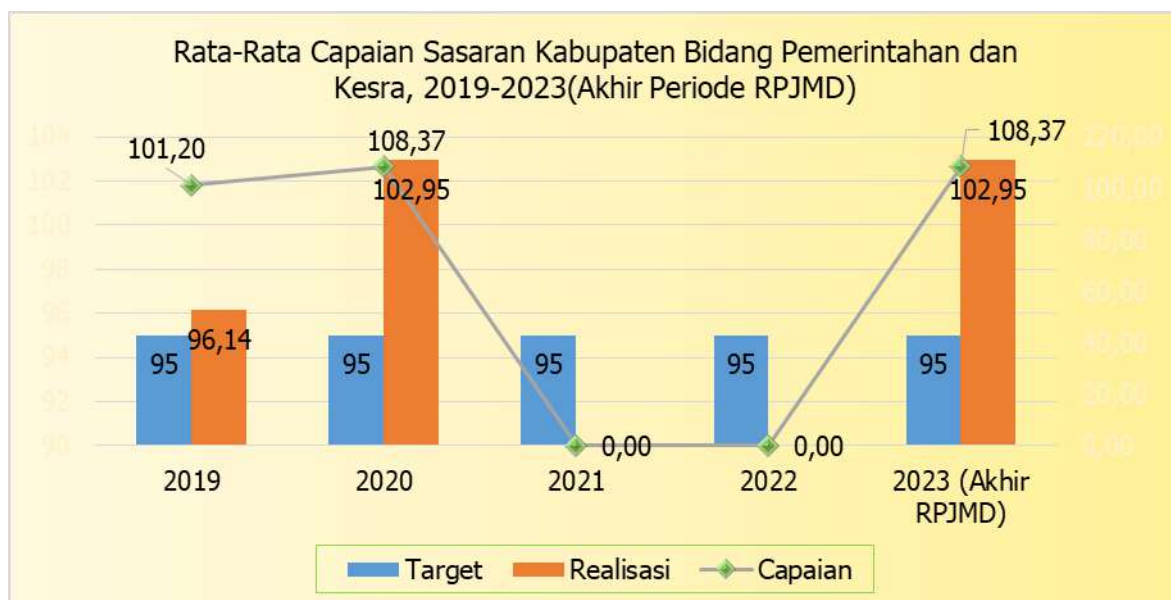
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renja Tahun 2021 dan triwulan II 2020 maka dibutuhkan adanya perubahan strategi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penyesuaian terhadap perubahan kebijakan terkait kondisi keuangan daerah serta dalam rangka mengoptimalkan dukungan terhadap capaian visi dan misi kepala daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat capaian kinerja sasaran SKPD yang sekaligus telah ditetapkan sebagai IKU Sekretariat Daerah, yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Klungkung. Telah ditetapkan tiga sasaran dengan empat indikator kinerja yang sekaligus merupakan IKU Perangkat Daerah.

Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra dengan indikator yaitu Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan sasaran yang ketiga Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung dengan 2 indikator yaitu Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dan Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi pelayanan Nasional tersedianya.

Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra pada tahun 2020 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.1. Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra 2019-Akhir RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Kinerja pertama dari Sekretariat Daerah adalah Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra di Kabupaten Klungkung diukur dengan Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra. Pada tahun 2020, Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra dengan target sebesar 95 persen telah terealisasi sebesar 102,95 persen atau capaian sebesar 108,37 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2020 telah tercapai 108,37 persen. Tahun 2020 merupakan tahun kedua periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 yang menyesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung. Untuk itu capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2020 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.2. Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, 2019-Akhir Periode RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 dengan target 95 persen terealisasi sebesar 110,21 persen atau tercapai 116,01 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2020 telah tercapai sebesar 116,01 persen. Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode 2019-2023.

Sedangkan capaian indicator sasaran yang kedua yaitu Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional adalah sebagai berikut :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.3 Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional, 2019-2023 Akhir Periode RPJMD

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung belum berhasil meraih nominasi penghargaan nasional pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SInovik), sehingga capaian kinerja Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional belum tercapai. Pada tahun 2019, aksi pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan nasional adalah sebanyak 1 aksi pelayanan public. Adapun aksi pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan nasional adalah : KRISS (Kring Sehat). Aksi ini masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Pada tahun 2018, aksi pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan nasional ada 2 yaitu BIMA JUARA (Beli Mahal Jual Murah) yang merupakan inovasi untuk peningkatan pendapatan petani melalui pemotongan jalur distribusi beras local dari petani langsung ke koperasi, serta inovasi TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) yang merupakan inovasi pengolahan sampah plastic langsung dari sumbernya. Kedua inovasi tersebut masuk nominasi TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2020 ditunjukkan pada grafik berikut ini



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.4. Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin) , 2019-2023 (Akhir Periode RPJMD)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin) pada tahun 2020 belum memenuhi target yang ditetapkan, dimana target ditetapkan sebesar 82 poin dan terealisasi sebesar 81,65 poin atau tercapai 99,57 persen. Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah sangat menentukan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP di tingkat Kabupaten. Jika hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah tidak memuaskan maka Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP di tingkat Kabupaten juga akan terpotret tidak memuaskan. Berikut ini disajikan hasil evaluasi SAKIP terhadap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Klungkung.

Untuk tingkat capaian indikator kinerja nilai AKIP Komponen Perencanaan dalam tiga tahun terakhir terus membaik dengan capaian kinerja semakin meningkat meski capaiannya masih terus dibawah target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2020, untuk komponen perencanaan pada implementasi perencanaan strategis, kualitas dan implementasi perencanaan tahunan. Pada implementasi RPJMD/Renstra kelemahan terjadi pada:

- a. Penyusunan RKPD/Renja yang belum mengacu pada dokumen RPJMD/Renstra,
- b. Target jangka menengah dalam RPJMD/Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- c. Dokumen RPJMD/Renstra belum direviu secara berkala.

Sedangkan pada kualitas perencanaan kinerja tahunan kelemahan yang terjadi yaitu pada :

- a. Penetapan target kinerja.
- b. Kegiatan yang direncanakan belum menggambarkan upaya pencapaian sasaran.
- c. Kegiatan yang mencapai sasaran belum menjadi prioritas/didukung oleh anggaran yang memadai.
- d. Dokumen PK yang belum selaras dengan RPJMD/Renstra dan belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- e. Pada tingkat perangkat daerah, rencana aksi atas kinerja belum mencantumkan target secara periodik atas kinerja.

Kelemahan pada implementasi perencanaan kinerja tahunan adalah sebagai berikut :

- a. RKPD belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- b. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.
- c. Pada tingkat PD, pencapaian rencana aksi atas kinerja belum dimonitor secara berkala.
- d. Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
- e. Perjanjian kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

Selanjutnya pencapaian kinerja program kegiatan Kabupaten Klungkung disajikan pada table 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung 2021

| Sasaran | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Capaian Keuangan (%) | Pelaksana |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 3.096.511.942,00 | 1.268.800.023,00 | 1.827.711.919,00 | 40,98 | Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Ham serta Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| Jumlah | | 3.096.511.942,00 | 1.268.800.023,00 | 1.827.711.919,00 | 40,98 | |
| Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Program Perekonomian dan Pembangunan | 1.111.441.620,00 | 244.484.600,00 | 866.957.020,00 | 22,00 | Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian PBJ |
| Jumlah | | 1.111.441.620,00 | 244.484.600,00 | 866.957.020,00 | 22,00 | |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | 35.252.463.372,00 | 11.749.746.238,00 | 23.502.717.134,00 | 33,33 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung | Daerah Kabupat en/Kota | | | | | Umum dan Bagian Organisasi |
| Jumlah | | 35.252.463.372,0 0 | 11.749.746.23 8,00 | 23.502.717.13 4,00 | 33,33 | |
| Grand Total | | 39.460.416.934,0 0 | 13.263.030.86 1,00 | 26.197.386.07 3,00 | 33,61 | |

Sumber : Sirenbangda, 2021

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, Sekretariat Daerah memiliki peran sentral dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki fokus sasaran yang jelas dan terukur. Sedangkan dalam menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan, maka Sekretariat Daerah diharapkan mampu menyediakan rekomendasi kebijakan prioritas daerah yang harus dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam empat tahun pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 mengalami kendala dan permasalahan yang menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan pada penyediaan data informasi perencanaan yaitu :
 - a) Perangkat daerah belum memiliki mekanisme pengumpulan data terkait tugas dan fungsinya secara baku, sehingga ketersediaan data informasi masih belum optimal.
 - b) Belum terbangunnya system informasi pengelolaan data perencanaan secara baik sehingga ketersediaan data informasi sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah belum optimal.

2. Permasalahan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu :
 - a) Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan. Dalam tiga tahun pelaksanaan Renstra, masih terdapat keterlambatan pelaksanaan tahapan kegiatan. Keterlambatan ini juga telah menjadi temuan dari instansi pengawasan.
 - b) Penyusunan renja perangkat daerah yang belum sesuai dengan ketentuan. Penyusunan perencanaan masih dianggap sebagai dokumen prasyarat yang sekedar ada sehingga penyelesaiannya dominan hanya pada Sekretariat (subbag perencanaan) bukan hasil dari diskursus seluruh pihak yang terkait (bidang-bidang). Akibatnya kualitas penetapan permasalahan/isu strategis, strategi, target kinerja dan program kegiatan prioritas belum jelas.
 - c) Kualitas indikator kinerja masih banyak belum memenuhi kriteria SMART. Kondisi diakibatkan belum dipahaminya kinerja dan penyusunan indikator kinerja sehingga hasilnya indikator kinerja yang dipasang belum menggambarkan kinerja yang dicapai dari kegiatan/program yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. Perumusan sasaran program kegiatan belum fokus dan jelas sehingga menyulitkan dalam perumusan indikator kerjanya.
 - d) Perencanaan belum disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kejelasan lokasi, status tanah dan perencanaan detilnya sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan gagal.
 - e) Lemahnya perumusan prioritas daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah selama ini belum mampu merumuskan prioritas daerah secara jelas dan terukur melalui pendekatan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial.
3. Permasalahan pada pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :
 - a) Pengendalian rencana pembangunan daerah belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kondisi ini akibat dari masih terjadinya inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen penganggaran.
 - b) Pelaksanaan program kegiatan belum didasarkan pada tahapan dan jadwal kegiatan yang jelas sehingga masih terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

4. Permasalahan pada evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :
 - a) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak tersusun dengan baik karena banyak kegiatan yang tidak terukur sebagai dampak belum konsistennya indikator kinerja.
 - b) Evaluasi baru pada tahap pengukuran kinerja belum mampu menyediakan rekomendasi perbaikan karena minimnya penyajian data dan identifikasi permasalahan.
5. Permasalahan pada pelaksanaan penelitian dan pengembangan diantaranya adalah :
 - a) Kegiatan penelitian dan pengembangan selama periode 2013-2018 belum optimal karena belum ditetapkannya Rencana Induk Kelitbang dan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Litbang yang dikembangkan selama ini, lebih banyak menunggu arahan pimpinan, kurang berdasarkan upaya pencarian solusi mengatasi permasalahan pembangunan.
 - b) Hasil kelitbang belum didiseminasikan secara optimal sehingga menjadi masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Permasalahan-permasalahan di atas, berdampak pada belum optimalnya capaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Beberapa kegiatan prioritas yang dirancang mengalami kegagalan karena lemahnya perencanaan seperti masalah kesiapan lahan, dokumen perencanaan dan terdapat sub pekerjaan yang tidak direncanakan sehingga outcome yang diharapkan tidak terwujud.

Selain permasalahan tersebut, juga perlu diidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah khususnya sesuai tugas dan fungsinya. Tantangan perencanaan ke depan diantaranya adalah:

- a. meningkatnya tuntutan akan penyelenggaraan pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan tuntas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan belum optimal disamping belum terimplementasinya pendekatan perencanaan substantif (tematik-holistik, integrative dan spasial). Perubahan mindset stakeholder perencanaan yang selama ini menyusun perencanaan lebih bersifat kegiatan rutinitas setiap tahun menjadi berbasiskan target kinerja yang jelas masih perlu upaya yang kuat dan berkelanjutan.

- b. Menguatnya tuntutan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang selama ini cenderung diabaikan. Kedepan tidak boleh lagi ada kegiatan yang tidak direncanakan tetapi dianggarkan. Hal ini adalah salah satu aksi prioritas dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Korupsi Terintegrasi.

Sedangkan peluang yang dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan diantaranya adalah :

- a. Kuatnya political will pimpinan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah baik melalui implementasi SAKIP dan roadmap Reformasi Birokrasi;
- b. Penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Terintegrasi yang merupakan bagian kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi yang didorong oleh KPK.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan dan peluang maka dapat dirumuskan isu strategis perencanaan sebagai berikut:

- a. Sistem pengelolaan data yang belum optimal
- b. Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal;
- c. Kualitas pengendalian dan evaluasi yang belum optimal;
- d. kualitas SDM perencanaan yang belum optimal, baik di internal Sekretariat Daerah maupun pada stakeholder (pelaku fungsi perencanaan di SKPD); dan
- e. Kelitbangan belum optimal mendorong inovasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 menyelenggarakan dua bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu "TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA" serta mendukung misi mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menyusun rencana kerja SKPD. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal. Untuk itu Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan : meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
- b. Sasaran :
 - 1) Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra
 - 2) Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung
 - 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021

| TUJUAN | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Tahun 2021 | Program Pendukung |
|---|--|---|-------------------|--|
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung | Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra | Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra | 95 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Bag. Hukum dan HAM), Program Program Pengembangan Otonomi Daerah (Bag. Pemerintahan), Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Pemerintahan), Program Pengembangan Kebijaksanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Kesra) |
| | Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 95 | Program Penyiapan data/Informasi Perkembangan Perekonomian daerah (Bag. Perekonomian) Program Peningkatan pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala daerah (Bag. Adm Pembangunan) Program penataan Pengadaan Barang/Jasa |

| | | | | |
|--|--|---|----|---|
| | | | | Pemerintah (Bag. APBJ) |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung | Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah | 85 | Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi) |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional | 1 | Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum), Program Pelayanan Kesekretariatan Dan Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum) |

Sasaran dan indikator sasaran telah ditetapkan sebagai target **Indikator Kinerja Utama** SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dan merupakan cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah. Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penilaian kinerja dan optimalisasi penerapan tunjangan kinerja berbasis aplikasi e-kinerja.
 - b. Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik
 - c. Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-besarnya untuk pelayanan publik
 - d. Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta
 - e. Mendorong praktik-praktik reformasi birokrasi melalui ransparansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkait
2. Strategi Kelemahan-Peluang (W-O)
 - a. Reformasi manajemen kinerja aparatur daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain
 - b. Reformasi manajemen pemerintahan daerah melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern yang lebih baik, mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kebijakan, transparansi pengadaan barang jasa dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam manajemen pemerintahan
3. Strategi Kekuatan – Ancaman (S-T)
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian budaya dan kesadaran hukum dimulai dari aparatur daerah
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan peundang-undangan yang berlaku melalui teknologi informasi
4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T)
 - a. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern untuk meningkatkan sumber daya aparatur
 - b. Upaya peningkatan partisipasi sektor perbankan dalam memberikan dukungan kepada lembaga keuangan mikro

- c. Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja aparatur daerah.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode 2018-2023 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
Periode 2018-2023

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|--|---|---|--|--|
| Visi :TerwujudnyaKlungkung yang Unggul dan Sejahtera | | | | |
| Misi 4: Terwujudnyapemerintahan yang responsiftransparan, santun dan inovatifdgnmenjagakepastianhukum dan stabilitaspolitik | | | | |
| 1. | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung | 1. Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra | 1.1. Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi kecamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat | 1.1. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kecamatan |
| | | | 1.2. Mendorong desa/kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi desa/kelurahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat | 1.2. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kelurahan/desa |
| | | | 1.3. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Korodinasi Kerjasama Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama daerah | 1.3. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kelurahan/desa |
| | | | 1.4. Melaksanakan penataan produk hukum daerah | 1.4. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan |
| | | | 1.5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui teknologi informasi | 1.5. Sosialisasi ke masyarakat |
| | | 2. Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 2.1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan pemerintah kab/kota, provinsi, kementerian dan instansi pemerintah lainnya. | 2.1. Koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah |
| | | | 2.2. Monitoring pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung | 2.2. Monitoring dan Evaluasi |
| | | | 2.3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan | 2.3. Monitoring dan Evaluasi |
| | | | 2.4. Meningkatkan transparansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkait | pelayanan bagi SKPD yang memanfaatkan ULP |
| | | | 2.5. Meningkatkan pengendalian terhadap program-program yang telah direncanakan | 2.5. Monitoring, Evaluasi |
| | | | 2.6. Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-besarnya untuk pelayanan publik | 2.6. Monitoring, Penyerapan Aspirasi ke Masyarakat |
| | | | 2.7. Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta | 2.7. monitoring, fasilitasi |
| | | | 2.8. Upayapeningkatanpartisipasisektorperbankandalammemberikandukungankepadalembagakeuanganmikro | 2.8. Monitoring, Fasilitasi |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung | 3.1. Reformasi manajemen kinerja Birokrasi maupun PNS dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain | 3.1. Fasilitasi, Koordinasi |
| | | 3.2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penilaian kinerja | |
| | | 3.3. Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja aparatur daerah | |
| | | 3.4. Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik | 3.4. penyusunan SOP SKPD, perangkat daerah yang efektif |
| | | 3.5. Meningkatkan pelayanan kepada tamu daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah dan juga apratur Setda | 3.5. Pelayanan di kantor, rumah jabatan dan luar daerah, penerimaan tamu daerah, pemeliharaan aset sekretariat daerah |

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun 2018 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2012-2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merencanakan 9 program, 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang difokuskan pada :

1. Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian dokumen rencana pembangunan daerah melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Penyediaan data dan informasi yang valid dan terkini sebagai bahan evaluasi dan masukan penyusunan rencana pembangunan melalui Program Pengembangan Data/Informasi;
3. Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui pelaksanaan Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peningkatan kualitas pengendalian rencana pembangunan daerah yang efektif dan terpadu melalui Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peningkatan konsistensi perencanaan perangkat daerah melalui pelaksanaan Program Perencanaan Sosial dan Budaya dan Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
6. Penyelenggaraan kelitbangan sesuai prioritas pembangunan daerah melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2021 kami tuangkan pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam APBD
Tahun 2021 dan Rencana Perubahan Tahun 2021

| DPA Tahun 2021 | | | | | | | | | | Renja Tahun 2021 Perubahan | | | | | | Bertambah (Berkurang) | C a t a n | | | | |
|--------------------------------------|----|----------------------|------------------------------------|--------|--|---|---------------------------|------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|
| Kode | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | Kode | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | |
| URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 39.460.416.934,00 | 4 | | | | | | | 41.820.917.344,00 | (2.360.500.410,00) | | | | | | |
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 39.460.416.934,00 | 4 | 01 | | | | | | 41.820.917.344,00 | (2.360.500.410,00) | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Program Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten | Setda Kabupaten Klungkung | 87 poin | 35.252.463.372,00 | 4 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Indeks Reformasi dan Birokrasi Perangkat Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 14,00 point | 20.352.699.560,00 | 14.899.763.812,00 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Penganggaran Ditetapkan Tepat Waktu | Setda Kabupaten Klungkung | 8 Dokumen | 21.811.423,00 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti | Setda Kabupaten Klungkung | 100,00 persen | 12.490.400,00 | 9.321.023,00 | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Penganggaran Tersusun Tepat Waktu | Setda Kabupaten Klungkung | 8 Dokumen | 15.976.873,00 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tepat waktu | Setda Kabupaten Klungkung | 18 dokumen | 8.006.400,00 | 7.970.473,00 | Pengurangan belanja makan minum |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu | Setda Kabupaten Klungkung | 31 laporan | 5.834.550,00 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu | Setda Kabupaten Klungkung | 12 laporan | 4.484.000,00 | 1.350.550,00 | pengurangan belanja ATK dan belanja makanan dan minuman rapat untuk refocusing anggaran |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | laporan Keuangan Terkirim tepat Waktu | Setda Kabupaten Klungkung | 4 laporan | 17.491.387.724,00 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan | Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Setda Kabupaten Klungkung | 12,00 laporan | 16.375.981.302,00 | 1.115.406.422,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------------------------|------------|-------------------|---|----|----|------|----|---|---|---------------------------|---------------|-------------------|------------------|--|
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN | Setda Kab.Klungkung | 12 bulan | 17.458.706.543,00 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN | Setda Kabupaten Klungkung | 100.00 persen | 16.345.778.202,00 | 1.112.928.341,00 | pengurangan anggaran TPP untuk refocusing anggaran |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran Tepat Waktu | Setda Kab.Klungkung | 13 laporan | 32.681.181,00 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran tepat waktu | Setda Kabupaten Klungkung | 12,00 laporan | 30.203.100,00 | 2.478.081,00 | pengurangan belanja ATK untuk refocusing anggaran |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian Disiplin aparatur | Setda Kabupaten Klungkung | 90 persen | 495.850.848,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Data kepegawaian Terupdate Tepat Waktu | | 90 persen | 495.850.848,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Setda Kabupaten Klungkung | 90 persen | 7.743.418.686,00 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Umum | Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi | Setda Kabupaten Klungkung | 100,00 persen | 3.964.227.858,00 | 3.779.190.828,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia Tepat Waktu | Setda Kab.Klungkung | 12 bulan | 3.885.631.154,00 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor | Setda Kabupaten Klungkung | 100.00 persen | 3.945.986.858,00 | (60.355.704,00) | pengurangan belanja ATK, Sesajen, pemeliharaan kendaraan dinas untuk refocusing anggaran |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase pemenuhan Bahan Logistik | Setda Kab.Klungkung | 12 bulan | 39.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 100 persen | 1.015.151.000,00 | | | | | | | | | | | | pengurangan belanja makan minum tamu untuk refocusing anggaran |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | | 100 persen | 2.785.249.832,00 | | | | | | | | | | | | pengurangan belanja perjalanan dinas untuk refocusing anggaran |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Persentase Surat Terkelola | | 100 persen | 18.386.700,00 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan pemenuhan layanan jasa surat menyurat | Setda Kabupaten Klungkung | 100.00 persen | 18.241.000,00 | 145.700,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---------------------------|------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 90 persen | 1.961.172.109,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | | 2 unit | 1.961.172.109,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 90 persen | 754.669.964,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah Terpelihara | | 5 unit | 754.669.964,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH/WKDH | Setda Kabupaten Klungkung | 100 persen | 1.331.548.342,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | | 100 persen | 676.348.342,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH | | 100 persen | 39.200.000,00 | | | | | | | | | | | pengurangan belanja pakaian dinas untuk refocusing anggaran |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Medical Check Up KDH/WKDH | | 100 persen | 16.000.000,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------------------------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Penyediaan Dana Penunjang OPRasional KDH/WKDH | | 100 persen | 600.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 100 persen | 840.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | 100 persen | 480.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | 100 persen | 360.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | Persentase OPD Dengan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Baik | Setda Kabupaten Klungkung | 64 Persen | 370.601.352,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase Perangkat Daerah dengan Kematangan Perangkat Daerah Sangat Tinggi | | 50 Persen | 2.087.850,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Persentase Unit Pelayanan Dengan Standar Pelayanan Publik Memadai | | 40 Persen | 2.087.850,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah Yang Siap Mengikuti Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi | | 31 OPD | 366.425.652,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persentase | 4.242.002.924,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolanan | Persentase Pemenuhan Layanan Protokol | | 100 Persentase | 465.403.660,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------------------------|---------------|------------------|---|----|----|------|----|--|---|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan | Setda Kabupaten Klungkung | 1 Kebijakan | 1.805.620.652,00 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang ditetapkan | Setda Kabupaten Klungkung | 1 Dokumen | 1.742.266.552,00 | 63.354.100,00 | - Pengurangan Honor Panitia Aci Bhakti Penganyar karena refocusing anggaran - Penambahan anggaran tenaga administrasi (Tenaga Kontrak) karena kekurangan anggaran di anggaran Induk - Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena refocusing anggaran |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan | Setda Kabupaten Klungkung | 1 Kebijakan | 23.140.152,00 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | Setda Kabupaten Klungkung | 1 Dokumen | 23.141.052,00 | (900,00) | - Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena refocusing anggaran - Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas karena refocusing anggaran |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Bidang Pariwisata yang ditetapkan | Setda Kabupaten Klungkung | 1 Kebijakan | 4.570.650,00 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | Setda Kabupaten Klungkung | 1 Dokumen | 4.570.800,00 | (150,00) | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah produk hukum yang ditetapkan tepat waktu | Setda Kabupaten Klungkung | 300 kebijakan | 985.179.088,00 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Tersusunnya kebijakan Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 588 Kebijakan | 931.089.476,00 | 54.089.612,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Rancangan Produk hukum tepat waktu | Setda Kabupaten Klungkung | 300 kebijakan | 354.096.584,00 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan | Setda Kabupaten Klungkung | 300 Dokumen | 395.665.704,00 | (41.569.120,00) | Penambahan anggaran belanja |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------------------------|--------------|------------------|---|----|----|------|----|---|---|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Desa Binaan Sadar Hukum | Setda Kabupaten Klungkung | 25 Desa | 416.130.552,00 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Permasalahan hukum difasilitasi | Setda Kabupaten Klungkung | 1 kebijakan | 435.955.120,00 | (19.824.568,00) | Penambahan anggaran belanja |
| | | | | | | Persentase Capaian RAD HAM | Setda Kabupaten Klungkung | 100 persen | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Cakupan dokumen hukum yang dipublikasikan | Setda Kabupaten Klungkung | 50 kebijakan | 214.951.952,00 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum Daerah yang terpublikasi | Setda Kabupaten Klungkung | 30 kebijakan | 99.468.652,00 | 115.483.300,00 | pengurangan anggaran belanja |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Terpenuhinya kebutuhan Kerjasama Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | 99.933.000,00 | 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 100 persen | 60.055.000,00 | 39.878.000,00 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | 99.933.000,00 | 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Dalam Negeri | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | 59.383.000,00 | 40.550.000,00 | pengurangan anggaran belanja |
| | | | | | | | | | | 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Luar Negeri | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | 387.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Terlaksananya Evaluasi Kerja Sama | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | 285.000,00 | | |
| 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Capaian IKU Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Setda Kabupaten Klungkung | 100 persen | 1.111.441.620,00 | 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Setda Kabupaten Klungkung | 5 kebijakan | 666.588.174,00 | 444.853.446,00 | |
| | | | | | | Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa | | 3,30 Indeks | | | | | | | | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti | | 100 Persen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Persentase Rencana Aksi Pembangunan Daerah yang Terealisasi | | 100 Persen | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa | | 3,30 indeks | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------------------------|------------|----------------|---|----|----|------|----|---|---|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|---|
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Cakupan terpenuhinya kebijakan Bidang Perekonomian | Setda Kabupaten Klungkung | 100 persen | 146.409.352,00 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Perekonomian | Setda Kabupaten Klungkung | 4 kebijakan | 67.688.452,00 | 78.720.900,00 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah kebijakan Bidang BUMD dan BLUD yang ditetapkan | Setda Kabupaten Klungkung | 2 jumlah | 14.579.800,00 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Kebijakan Bidang BUMD dan BLUD yang ditetapkan | Setda Kabupaten Klungkung | 1 kebijakan | 11.539.500,00 | 3.040.300,00 | - Pengurangan belanja : Alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman dan perjalanan dinas. untuk refocusing anggaran |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah kebijakan Bidang Pengendalian dan Distribusi yang ditetapkan | Setda Kabupaten Klungkung | 3 jumlah | 97.688.152,00 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi Makro yang ditetapkan | Setda Kabupaten Klungkung | 2 kebijakan | 39.660.952,00 | 58.027.200,00 | pengurangan anggaran belanja |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah kebijakan Bidang Ekonomi Mikro Kecil yang ditetapkan | Setda Kabupaten Klungkung | 1 jumlah | 34.141.400,00 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Kebijakan Ekonomi Mikro yang ditetapkan | Setda Kabupaten Klungkung | 1 kebijakan | 16.488.000,00 | 17.653.400,00 | pengurangan anggaran belanja |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase Rencana Aksi Pembangunan Daerah yang Terealisasi | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | 387.728.210,00 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Administrasi Pembangunan | Rekomendasi yang tindak lanjuti | Setda Kabupaten Klungkung | 80 Persen | 205.671.664,00 | 182.056.546,00 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Persentase Cakupan Program Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | 154.420.000,00 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Cakupan Program Pembangunan | Setda Kabupaten Klungkung | 80 Program Pembangunan | 27.604.000,00 | 126.816.000,00 | pengurangan anggaran belanja |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Persentase Tindak Lanjut Hasil Inspeksi | Setda Kabupaten Klungkung | 80 Persen | 69.987.100,00 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Laporan Pengendalian dan Evaluasi | Setda Kabupaten Klungkung | 12 Laporan | 22.733.500,00 | 47.253.600,00 | pengurangan anggaran belanja |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah laporan Pembangunan Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | 163.321.110,00 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Pelaporan Evaluasi Pembangunan Daerah | Setda Kabupaten Klungkung | 12 Laporan | 155.334.164,00 | 7.986.946,00 | pengurangan anggaran belanja |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil monitoring | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pengadaan B/J Yang Selesai | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | 532.652.606,00 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pengadaan B/J Yang Selesai | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | 359.414.606,00 | 173.238.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---------------------------|------------|----------------|---|----|----|------|----|--|---|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase dokumen persiapan B/J sesuai standar | Setda Kabupaten Klungkung | 70 Persen | 295.982.702,00 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase dokumen persiapan B/J sesuai standar | Setda Kabupaten Klungkung | 70 Persen | 252.188.702,00 | 43.794.000,00 | pengurangan anggaran belanja |
| | | | | | | Persentase kontrak B/j terlaksana | Setda Kabupaten Klungkung | 80 Persen | | | | | | | | Persentase kontrak B/j terlaksana | Setda Kabupaten Klungkung | 80 Persen | | | |
| | | | | | | Persentase penetapan penyedia | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | | | | | | | | Persentase penetapan penyedia | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | | | |
| | | | | | | Persentase perencanaan B/J sesuai standar | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | | | | | | | | Persentase perencanaan B/J sesuai standar | Setda Kabupaten Klungkung | 100 Persen | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Persentase Layanan Aplikasi Sistem Informasi B/J Beroperasi | Setda Kabupaten Klungkung | 95 Persen | 85.785.952,00 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Persentase Layanan Aplikasi Sistem Informasi B/J Beroperasi | Setda Kabupaten Klungkung | 95 Persen | 78.643.952,00 | 7.142.000,00 | pengurangan anggaran belanja |
| | | | | | | Persentase pemenuhan infrastruktur Sistem Informasi B/J | Setda Kabupaten Klungkung | 80 Persen | | | | | | | | Persentase Layanan Jaringan Sistem Informasi B/J | Setda Kabupaten Klungkung | 95 Persen | | | |
| | | | | | | Persentase proses PBJ melalui Sistem Informasi B/J | Setda Kabupaten Klungkung | 8 Persen | | | | | | | | Persentase pemenuhan infrastruktur Sistem Informasi B/J | Setda Kabupaten Klungkung | 80 Persen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Persentase proses pjb melalui SI | Setda Kabupaten Klungkung | 8 Persen | | | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM B/J | Setda Kabupaten Klungkung | 60 Persen | 150.883.952,00 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM B/J | Setda Kabupaten Klungkung | 60 Persen | 28.581.952,00 | 122.302.000,00 | pengurangan anggaran belanja |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM dari Pengadaan Baru | Setda Kabupaten Klungkung | 42 Persen | | | | | | | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM dari Pengadaan Baru | Setda Kabupaten Klungkung | 42 Persen | | | |
| | | | | | | Persentase SDM B/J Bersertifikat | Setda Kabupaten Klungkung | 50 Persen | | | | | | | | Persentase SDM B/J Bersertifikat | Setda Kabupaten Klungkung | 50 Persen | | | |

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2021 berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021 dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga triwulan II tahun anggaran 2021, serta memuat permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam hal adanya kebijakan terkait kondisi keuangan daerah yang akan mempengaruhi pelaksanaan Perubahan Renja ini maka optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja ini melalui perubahan strategi pelaksanaan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 ini.

BUPATI KLUNGKUNG,

INYOMAN SUWIRTA